MADANI
JURNAL POLITIK DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

MADANI
Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan
Vol 14 No 3 (2022) : Desember 2022
(P-ISSN 2085 - 143X) (E-ISSN 2620 - 8857)

Analisis Distribusi Fasilitas Pelayanan Pendidikan Sekolah Menegah Atas (SMA)

Husain Hamka[1], Misilia[2], Ridwan Malik[3]

[1]Program Studi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Bosowa Makassar, [2,3] Universitas Pejuang Republik Indonesia
[1]husain.hamka1990@gmail.com, [2]akumislia123@gmail.com, [3]ridwanmalik1961@gmail.com

Received: 04 September 2022; Revised: 30 Oktober 2022; Accepted: 15 November 2022; Published: Desember 2022; Available online: Desember 2022

Abstract

Education is an important aspect of people's life development and contributes to improving their quality of life. Education is very important as it is the basis for developing a constructive and creative mindset. The 1945 Constitution obliges the government to undertake and organize a national character education system to strengthen faith in and devotion to Almighty God and to educate the lives of its citizens. Indonesia is an educated country, but the current Indonesian education situation is still inconsistent. This has become one of the educational problems in Indonesia as education is still not evenly distributed. Governments therefore need to reflect on the importance of educational equity. This is especially true in poor and remote communities in Indonesia.

Keywords: Educational Services, facility high school

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat serta berperan untuk meningkatkan kualitas hidup. Pendidikan sangat penting karena merupakan dasar untuk pengembangan pola berpikir konstruktif dan kreatif. Melalui pendidikan yang cukup memadai, maka seseorang akan bisa berkembang secara optimal baik secara ekonomi maupun sosial. Pendidikan itu sendiri dapat dipandang dari arti luas dan arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan itu setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, secara jelas menyatakan bahwa pemerintah harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan. Baik dalam kehidupan lokal, nasional dan global, Sehingga perlu adanya strategi yang bersifat inovatif yang terencana, terarah dan berkesinambungan

Indonesia merupakan negara yang berpendidikan, namun saat ini kondisi pendidikan di Indonesia masih belum merata, dengan pendidikan yang masih belum merata ini maka hal ini menjadi salah satu masalah pendidikan di Indonesia. Olehkarena itu pemerintah harus berpikir penuh tentang pentingnya pemerataan pendidikan, terutama dalam kelompok masyarakat yang miskin dan masyarakat yang ada di daerah terpencil yang ada di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnaen & Handoyo (2019) yang hasil penelitiannya menemukan bahwa ketidakmerataan pendidikan di Indonesia menjadi kendala dan tanggung jawab pemerintah, karena kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap kondisi pendidikan di Indonesia. Hal ini juga sesuai dengan yang ditemukan oleh Subekti & Suprihardjo (2020) yang mengemukakan bahwa permasalahan mendasar fasilitas pendidikan terletak pada penyediaan dan distribusi yang belum merata antar

wilayah serta belum sesuai dengan kebutuhan karakteristik pemukimannya.

Upaya dalam mengatasi persoalan ketidakmerataan fasilitas pendidikan maka perlu ditunjang oleh adanya optimalisasi yang didasarkan pada persebaran pemukiman. Distribusi fasilitas pendidikan sekolah berdasarkan pola persebaran pemukiman dikembangkan berdasarkan permasalahan serta kondisi eksisting di suatu wilayan. Karakteristik pola persebaran pemukiman satu dengan pemukiman lainnya dalam arti jarak antara sekolah mampu menjelaskan jarak jangkauan layanan suatu layanan pendidikan di sekolah. Kondisi ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan sekolah menyebabkan tidak efisien dalam distribusi sekolah termasuk biaya operasional sehingga dibutuhkan suatu konsep distribusi fasilitas pendidikan yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan wilayah dengan ketersediaan fasilitas pendidikan untuk perluasan pemerataan akses pendidikan masing-masing wilayah berdasarkan pola persebaran pemukiman (Widianantari. 2018).

Pemerataan pendidikan berkaitan dengan seberapa besar pendidikan telah menjangkau seluruh warga negara. Mutu pendidikan berkenaan dengan seberapa mendalam pendidikan telah memberikan nilai tambah pada para peserta didik. Pemerataan pendidikan dapat dilihat dari jumlah sekolah berpenduduk usia sekolah, jumlah guru, jumlah siswa prasekolah (Danamik, J. 2017) Pemeratan pendidikan yang dilaksanakan di berbagai daerah mempunyai bermacam-macam kendala dalam melaksanakannya. Permasalahan tersebut di sebabkan oleh daerah pedesaan yang terpencil dan jauh dari perkotaan dalam mengakses layanan pendidikan yang masih belum terdistribusi secara merata. (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014)

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2014 : 23), ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam mencapai target pembangunan pendidikan, yaitu salah satunya adalah akses pendidikan yang belum merata, masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik S1/D4 dan belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada rendahnya rasio guru dan murid. Dan belum optimalnya pelayanan pendidikan sebagai akibat akses terbatasnya sarana dan prasarana

pendidikan. Belum maksimalnya perluasan akses dan pemerataan pendidikan, dan masih rendahnya kualitas dan kuantitas guru yang menjadi penyebab pendidikan tidak merata di Indonesia.

Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Black, Jhon. (2020)bahwa faktor yang mempengaruhi distribusi fasilitas pendidikan yaitu tingkat aksebilitas dan kepadatan penduduk (demografi) permukiman. Sedangkan Sonhaji, et.al. (2021) yang menemukan bahwa faktor yang berpengaruh secara signifikan yang mempengaruhi distribusi fasilitas pendidikan adalah variabel jumlah penduduk. Oleh karena distribusi fasilitas pendidikan yang sebagaimana dilakukan oleh Sonhaji, et.al. (2021) dianggap merupakan penelitian yang sudah lama sementara optimalisasi pemerataan fasilitas pendidikan sekolah berdasarkan wilayah dan pola persebaran permukiman di setiap daerah masih merupakan permasalahan pokok dalam proses penyelenggaraan pendidikan di setiap sekolah yang masih merupakan permasalahan di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini masih perlu dilakukan pengembangan penelitian terkait dengan faktor penentu yang mempengaruhi optimalisasi distribusi sekolah.(Eko, T., & Rahayu, S. 2021)

Standarisasi Nasional terkait pemenuhan fasilitas Pendidikan digunakan standarisasi jumlah populasi atau jumlah penduduk yang berhubungan dengan tingkat pelayanan. (Badoa et al, 2019)

Setiap fasilitas perkotaan minimal harus memiliki syarat layanan pendidikan .kawasan Pendidikan dapat dikatakan terpadu jika terdapat TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi.namun dalam kategori sistem Pendidikan tinggi tidak mutlak karena bergantung pada jumlah populasi. Oleh karena jumlah populasi menjadi sangat penting sebagai ukuran. Contohnya untuk mengukur tingkat pelayanan berdasarkan hirarki sistem administrasi kewenangan pemerintahan yaitu tingkat RW fasilitas Pendidikan minimal memiliki satu Taman K anak kanak(TK), setiap RT minimal memiliki satu Sekolah Dasar (SD), setiap Kelurahan minimal memiliki satu Sekolah Menengah Pertama (SMP), setiap Kecamatan minimal mimiliki satu Sekolah Menengah Atas (SMA) Liana (2016)

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan penelitian literatur reviw yang dimana hasil penelitia didapatakan dari hasil penelusuran sejumlah artikel, tahap hasil penelitian menggunkan PICO, untuk pencarian menggunakan google scholar dengan penggunakan PICO: distribusi fasilitas DAN pelayanann Pendidikan DAN Sekloha menengah atas di dapatakan hasil 24.800 artikel kemudian dilakukan filter dengan Time 2 tahun terakhir didapatakan artikel sebanyak 8.160 artikel kemudian dilakukan filter Kembali menggunakan artikel relevan di dapatakan sebanyak 48 artikel setelah kemudian di filter Kembali dengan membaca semua abstrak 48 artikel yang sesuai dengan penelitian sebanyak 20 artikel, kemudian di filter kemabli dnegna membaca secara keselurahan artikel di dapatakan 5 artikel yang sesuai dengan judul penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian menggunakan PICO dengan penelusuran artikel di google scholar di dapatakan 5 artikel yang sesuai dengan judul penelitian meliputi:

artikel 1 penelitian yang dilakukan oleh Sri Maryati et al (2022) dengan judul"Pemetaan Fasilitas Umum dan Sosial Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan di Desa Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara" . hasil penelitian di dapatkan bahwa Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa memerlukan ketersediaan infrastruktur dan fasilitas umum sosial yang memadai.

Pembangunan infrastruktur di desa memerlukan perencanaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai karakteristik masing-masing desa. Hasil observasi lapangan di Desa Raku menunjukkan beberapa temuan yaitu infrastruktur dan fasilitas umum sosial belum memadai, belum ada peta sebaran infrastruktur, dan peta yang ada belum up to date salah satunya peningkatan fasilitas Pendidikan baik TK, SD, SMP dan SMA, perlu adanya peningkatan peningkatan fasilitas Pendidikan.(Jenggawah et al, 2022)

Artikel 2 penelitian yang dilakukan oleh Mukmin Al Kahfi & Dyah Widiyastuti (2020) dengan judul" Kajian Ketersediaan Dan Pola Distribusi Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat Di Kabupaten Karanganyar" di dapatakan bahwa Fasilitas pendidikan tingkat SMA di

Kabupaten Karanganyar hanya terdapat 53 unit. Sedangkan untuk melayani penduduk Kabupaten Karanganyar yang berjumlah 856.198 jiwa setidaknya membutuhkan unit fasilitas pendidikan tingkat SMA yang lebih banyak lagi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan, pola distribusi dan kelengkapan sarana prasarana fasilitas pendidikan SMA/Sederajat di Kabupaten Karanganyar. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Hasil analisis ketersediaan fasilitas pendidikan tingkat SMA menunjukan hanya Kecamatan Karanganyar yang memenuhi standar. Jangkauan spasial fasilitas pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Karanganyar terletak pada tipologi sedang yaitu 63,09 % yang menunjukan bahwa jangkauan spasial pendidikan SMA/sederajat di Kabupaten Karanganyar belum mencapai seluruh wilayah permukiman yang ada. Hasil analisis scalling menunjukan bahwa berdasarkan jenis pendidikannya, persentase kelengkapan sarana prasarana pendidikan SMA, SMK dan MA adalah 90%, 80% dan 89%. Sedangkan berdasarkan status pendidikannya, sarana prasarana pendidikn tingkat SMA yang berstatus negeri dan swasta mencapai 94% dan 78%.

Artikel 3 penelitian yang dilakuakan oleh Kiki Ferdiana & Ika Ayuningtyas (2022) dengan judul" Mengukur Ketimpangan Anak Terhadap Pendidikan di Jawa Timur" mendapatkan hasil bahwa ada ketimpanagan fasilitas Pendidikan antara sekolah swatasa dan negeri dimana fasilitas sekolah swasta yang bertaraf internasional memiliki fasilitas yang sangat mumpuni dari sarana dan prasana sedangkan untuk faslitas sekolah negri mempunya fasilitas tidak terallaui memadai.

Artikel 4 Hapon Ch Gewab et al(2021) dengan judul" Analisis Kebutuhan Dan Sebaran Fasilitas Pendidikan Tingkat Smp Dan Sma Di Kabupaten Tambrauw" di dapatakan hasil pendidikan dan distribusi SMP dan SMA berdasarkan rombongan belajar serta kondisi jalan. Berdasarkan analisis terhadap penyediaan fasilitas pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Tambrauw belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan penduduknya serta belum dapat menjangkau seluruh wilayah ini dari tingkat efisiensi dan efektifitas.

Artikel 5 Arif Prastiawan et al (2021) dengan judul" Hubungan Mutu Fasilitas Sekolah Dengan Kepuasan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri" mendapatakan hasil

dalam kategori sedang, (2) tingkat kepuasan peserta didik terhadap mutu fasilitas sekolah di SMA Negeri Kota Malang berada dalam kategori sedang, (3) terdapat hubungan yang signifikan antara mutu fasilitas sekolah dengan kepuasan peserta didik di SMA Negeri Kota Malang

2. Pembahasan

Faktor dominan yang membedakan kondisi desa dan kota selain dominasi mata pencaharian di sektor pertanian adalah ketersediaan fasilitas umum dan sosial. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan fasilitas antara desa dan kota. Pembangunan infrastruktur di desa memerlukan perencanaan yang baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai karakteristik masing-masing desa. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Perencanaan pendidikan sangat erat kaitannya dengan teori lokasi. Penempatan fasilitas pendidikan yang tepat diharapkan mampu menjangkau seluruh penduduk yang ada pada suatu daerah pendidikan salah satunya adalah hirarki pelayanan fasilitas pendidikan. Di tingkat desa yang relatif memiliki jumlah penduduk yang sedikit, terdapat fasilitas pendidikan Sekolah Dasar (SD). Di tingkat kecamatan terdapat fasilitas pendidikan SMP atau SMA yang jangkauannya lebih luas daripada tingkat desa.

Pendidikan adalah usaha sadar serta terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menumbuhkan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara

Berdasarkan defenisi fasilitas sosial yang telah diuraikan di atas, maka fasilitas pendidikan dapat didefenisikan sebagai aktifitas atau materi yang dapat melayani kebutuhan masyarakat akan kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan sosial, mental, dan spiritual melalui perwujudan suasana belajar dan proses pembelajaran yang menjadikan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara

Kesimpulan

Hasil penelitian di dapatakan bahwa ada kesejanggan fasilitas Pendidikan baik fasilitas sekolah swasta dan negri maupun kesenjangan fasilitas antara sekolah di pedesan dan sekolah yang berada di kota

Daftar Pustaka

Arif Prastiawan, Mustiningsih & Bambang Budi Wiyono .2021. Hubungan Mutu Fasilitas Sekolah Dengan Kepuasan Peserta Didik Di Sekolah Menengah Atas (Sma) Negeri. Manajemen Pendidikan, Volume 25, Nomor 2; 215-223.

Black, Jhon. 2020. Urban Transport Planning, Dalam Wayan Agus Slamet. Persepsi Wisatawan Terhadap Aksesibilitas Dari Penolakan Menuju Objek Wisata Toya Bungkah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Jurnal IPTA. ISSN : 2338-8633

Badoa, M. D., Kapantow, G. H. M., & Ruauw, E. . . (2019). Faktor–Faktor Penyebab hambatan dan pendorong dalam pengambilan keputusanKecamatanTomohonSelatanKotaTomohon.AgriSosioekonomi,14(2,195.https://doi.org/10.35791/agrsosek.14.2.2018.2058

Danamik, J. 2017. Keterkaitan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). JDP, P 182 Volume 10 Nomor 2.

Eko, T., & Rahayu, S. (2021). Land use change and suitability for RDTR in periurban areas. Case Study:District Mlati. Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota, 8(4), 330–340.

Hapon Ch Gewab , Andi A. Malik, & Hendriek H Karongkong. 2021. Analisis Kebutuhan Dan Sebaran Fasilitas Pendidikan Tingkat Smp Dan Sma Di Kabupaten Tambrauw. Sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Vilume 4 nomor 1

Jenggawah, N., Pada, S., Berpikir, K., Dan, K., & Belajar, M. (2022). Digital Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember Jember Digital Jember Digital Repository Repository Universitas Universitas Jember. 68–74.

Kiki Ferdiana & Ika Ayuningtyas.2022. Mengukur Ketimpangan Anak Terhadap Pendidikan di Jawa Timur. JIKOSTIK – Jurnal Ilmiah

Komputasi dan Statistika. Volume 1, Nomor 2, Februari 2022

Liana, N.A., Benty, D.D.N., & Supriyanto, A. 2016 Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Orang Tua Peserta Didik Terhadap Layanan Pendidikan. Jurnal Manajemen Pendidikan Volume 25, Nomor 1, Maret 2016: 39-46. Universitas Negeri Malang.

Mukmin Al Kahfi & Dyah Widiyastuti. 2020. Kajian Ketersediaan Dan Pola Distribusi Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas/ Sederajat Di Kabupaten Karanganyar. Jurnal sosial budaya masyarakat. Vilume 6 nomo 3

Sonhaji, A.N., Suprihardjo, R., & Setiawan, P.R., 2021. Konsep Distribusi Layanan Sekolah Dasar (SD/MI Berdasarkan Pola Persebaran Permukiman di Kabupaten Gresik. Jurnal Penataan Ruang Vol. 5, No. 1.

Subekti, S., & Suprihardjo, R. 2020. Konsep Optimalisasi Distribusi Sekolah Tingkat Dasar (SD/MI) Berdasarkan Pola Persebaran Permukiman di Kabupaten Ngawi. Jurnal Teknik Pomits, Vol. 3, No. 2 (2014), ISSN:2337- 3539.

Sri Maryati , Muh Kasim , Fitrianingsih Antula, Riski I. Pidu , Rahmia Rahman , Delta Jexica Sianturi , Widya Candra Mooduto, Muhlis Ali , Aulia Fitrah Ramadhani , Mohamad Adrian Saputra , Aditya Prasetyo Mangkat & Abd. Rahman Maloho. 2022. Pemetaan Fasilitas Umum dan Sosial Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan di Desa Raku, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara. LAMAHU: Jurnal Pengabdian Masyarakat Terintegrasi. Vol. 1, No. 2 August 2022

Zulkarnaen, & Hamdoyo, A.D., 2019. Faktor-faktor Penyebab Pendidikan Tidak Merata di Indonesia. Prosiding Seminar Nasional "Menjadi Mahasiswa yang Unggul di Era Industri 4.0 dan Society 5.0.

Widianantari. 2018. Kebutuhan Dan Jangkauan Pelayanan Pendidikan di Kecamatan BandonganKabupaten Magelang. Tesis Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Semarang Universitas Diponegoro